

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, DAN
KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Hesti Mariani

No. Mahasiswa : 20312156

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT,
DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

**(Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2018-2022)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Srata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Bisnis dan Ekomomika UII

Diajukan Oleh :

Nama : Hesti Mariani

No. Mahasiswa : 20312156

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Penulis,




(Hesti Mariani)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, DAN
KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi di Bursa
Efek Indonesia Periode 2018-2022)**

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Hesti Mariani

No. Mahasiswa : 20312156

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 1 Juli 2024

Dosen Pembimbing,



(Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra)

MOTTO

*“ it’s okay to cry when there’s too much on your mind,
The clouds rain too when things get heavy”*

*“Nothing last forever but at least we got these memories,
we’ll never be those kids again “*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada penulis dalam menjalani kehidupan serta mengajarkan penulis menjadi umat-Nya dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak.

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu pihak-pihak praktisi khususnya Pemerintah Republik Indonesia serta Direktur Jenderal Pajak selaku regulator di bidang perpajakan Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik beserta saran yang sekiranya dapat membantu penulis untuk memperbaiki karya ilmiah serta memperluas wawasan penulis.

Keberhasilan penelitian ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Abuani dan ibu Risliani yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan moral kepada penulis sehingga dapat memotivasi penulis untuk senantiasa melakukan yang terbaik disetiap langkah.
2. Ibu Reni Yendrawati Dra., M.Si., CFra. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan kemudahan, memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan membimbing dengan sabar selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku ketua Prodi Akuntansi serta segenap jajaran staff pengajar Prodi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Ari, Jefri, dan Annisa selaku kakak- kakak tercinta penulis. Terimakasih atas doa, dukungan, saran serta morivasi yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Ayuka Demilarsa keponakan penulis yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan penuh semangat.

8. Sahabat penulis Pipi dan Shelvy terimakasih telah menemani, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi teman bermain penulis selama di Yogyakarta.
9. Teman-teman seperjuangan dibangku perkuliahan yakni, Sephia, Sinta, Rafni, Rayi, Vanya, dan Wening. Terimakasih atas doa, bantuan, motivasi, semangat dan kebersamaan yang telah kita lalui dari awal perkuliahan hingga saat ini. Akhir kata, semoga allah selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, Juni 2024



Hesti Mariani

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di be

Disusun oleh : HESTI MARIANI

Nomor Mahasiswa : 20312156

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 05 Agustus 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.

Penguji : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Ariyanto, S.P., M.M., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11

2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	11
2.1.2 <i>Skateholder Theory</i>	13
2.1.3 Penghindaran Pajak.....	14
2.1.4 Ukuran Perusahaan	15
2.1.5 Koneksi Politik.....	16
2.1.6 Kualitas Audit.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Hipotesis Penelitian.....	21
2.3.1 Ukuran Perusahaan.....	21
2.3.2 Kualitas Audit.....	22
2.3.3 Koneksi Politik.....	23
2.4 Kerangka Konseptual.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Populasi dan Sampel.....	25
3.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	26
3.2.1 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	27

3.3 Definisi Operasional Variabel.....	27
3.3.1 Variabel Independen.....	27
3.3.1.1 Ukuran Perusahaan.....	28
3.3.1.2 Kualitas Audit.....	28
3.3.1.3 Koneksi Politik.....	29
3.3.2 Variabel Dependen.....	30
3.3.2.1 Penghindaran Pajak.....	31
3.4 Teknik Pengujian Data.....	31
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.4.1.1 Uji Normalitas.....	32
3.4.1.2 Uji Multikolinearitas.....	32
3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas.....	32
3.4.1.4 Uji Autokorelasi.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	34
3.5.2 Uji F.....	35
3.5.3 Uji T.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36

4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.2 Teknik Pengujian Data.....	37
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	37
4.2.1.1 Uji Normalitas.....	37
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas.....	38
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	40
4.2.1.4 Uji Autokorelasi	40
4.3 Teknik Analisis Data.....	41
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2 Uji F.....	43
4.2.3 Uji T.....	44
4.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	45
4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.....	46
4.4.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	47
4.4.3 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak.....	49
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Keterbatasan penelitian.....	50

5.3 Saran.....	51
5.4 Implikasi.....	52
DAFTAR REFENRENSI.....	54
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Tax Ratio (PDB).....	2
Tabel 1.2 Efektivitas Penerimaan Pajak.....	3
Tabel 4.1 Perolehan Data Sampel.....	36
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	40
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif Berskala Rasio.....	41
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif untuk Variabel Dummy.....	42
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	43
Tabel 4.9 Hasil Uji T	44
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	24
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nama-nama Perusahaan Sampel.....	59
Lampiran 2	Data Sampel.....	60
Lampiran 3	Hasil Uji Normalitas	63
Lampiran 4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Lampiran 5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64
Lampiran 6	Hasil Uji Autokorelasi.....	64
Lampiran 7	Hasil Statistik Deskriptif Berskala Rasio.....	65
Lampiran 8	Hasil Statistik Deskriptif Berskala Nominal.....	66
Lampiran 9	Hasil Uji F.....	66
Lampiran 10	Hasil Uji T.....	66

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of company size, audit quality, and political connections on tax avoidance. The object of this research uses consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the 2018-2020 period. Meanwhile, the research sample was 155 samples from 31 companies that were selected using purposive sampling techniques. The testing method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study show that the company size variable has a significant positive influence on tax avoidance, while audit quality and political connections have no influence on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Company Size, Audit Quality, Political Connections.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Objek dari penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Sedangkan sample penelitian sebanyak 155 sample dari 31 perusahaan yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Koneksi Politik.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat penting bagi negara karena mempunyai dampak yang besar terhadap pendapatan negara. Pajak merupakan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pemungutan orang pribadi maupun badan usaha dan biasanya bersifat wajib. Masyarakat tidak merasakan secara langsung manfaat pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan kolektif dan umum, bukan untuk kepentingan individu (Stawati, 2020).

Pendapatan pajak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual warga negara. Untuk mencapai hal ini, negara perlu meningkatkan pendapatan domestiknya (Gazali *et al*, 2020). Pemerintah harus mengerahkan segala upaya untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dari pendapatannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia, maka pajak menunjang pendapatan negara (Finosari *et al*, 2020).

Menurut data badan statistik yang digunakan dalam penelitian (Asadanie dan Venusita, 2020), penerimaan pajak mencapai 85% pada tahun 2017, sedangkan 14,3% pendapatan sektor pemerintah babas pajak dan 0,1% berasal dari hibah. Pada beberapa tahun terakhir target penerimaan

pajak mulai meningkat pesat. Namun masih ada Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tax ratio merupakan alat ukur yang digunakan untuk membandingkan penerimaan pajak dengan *produc domestic bruto* (PDB) selama periode waktu tertentu. Tarif pajak yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat belum menyadari perlunya membayar pajak sebagaimana mestinya dan pemerintah belum sepenuhnya mampu memanfaatkan pendapatan pajak dari berbagai sektor ekonomi (Sindonews.com, 2024).

Tabel 1.1
Tabel tax ratio terhadap (PDB) Indonesia (2019-2023)

No	Nama	Nilai / Persen
1.	2019	9,8
2.	2020	8.3
3.	2021	9.1
4.	2022	10.4
5.	2023	9.6

Sumber : katadata media network

Tabel diatas memberikan gambaran penerimaan pajak tidak stabil. dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dapat disimpan ke kas negara, yang pada akhirnya memperlambat inisiatif pemerintah dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya penerimaan pajak juga berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai ekspektasi

pemerintah. Pemerintah ingin penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menetapkan target pajak tahunan yang meningkat, namun tidak dapat dipenuhi. Informasi mengenai efisiensi pemungutan pajak tahun 2019 hingga tahun 2023 disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Efektifitas penerimaan pajak 2017-2021

Tahun	Realisasi	Target
	(triliun rupiah)	(%)
2019	Rp 1.332.67	84.5
2020	Rp 1.072.11	89.4
2021	Rp 1.278.63	104.0
2022	Rp 1.716,77	115.6
2023	Rp 1.869.23	102.8

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 ke tahun 2020 menurun, namun pada tahun 2021 hingga 2023 mulai mengalami peningkatan.

Walaupun penerimaan pajak makin meningkat namun tetap saja masih ada dari wajib pajak yang ingin mengurangi kewajiban pajak mereka, salah satunya adalah tindakan perusahaan dalam mengelola beban pajak yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menyembunyikan

keuntungan *real*. Dunia usaha melakukan hal ini karena membayar pajak dapat mempunyai dampak negatif yang besar terhadap keuntungan, sehingga membuat mereka bersemangat untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Banyak perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai cara untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. karena tidak dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak melanggar undang-undang perpajakan, penghindaran pajak mengacu pada segala upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang aman atau sah bagi wajib pajak. Untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar, berbagai strategi dan cara biasanya memanfaatkan ambiguitas peraturan perundang-undangan dan ketentuan pajak itu sendiri. Menghindari pajak adalah langkah penting menuju penurunan pajak yang harus dibayar, menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development*. Inisiatif-inisiatif ini sangat bertentangan dengan tujuan dasar undang-undang, meskipun tidak melanggar hukum (Wanda dan Halimatusadiah, 2021). Jika perusahaan menghasilkan lebih banyak uang, mereka biasanya menghindari pembayaran pajak. Selain itu, tingkat penghindaran pajak dan operasional bisnis yang dilakukan oleh manajer, seperti halnya pengelolaan inventaris, ditentukan oleh mekanisme pemantauan kinerja manajer melalui penerapan kelola (Yulianty *et al*, 2021).

Contoh nyata dari penghindaran pajak salah satu nya yaitu PT Asian Agri melakukan penghindaran pajak di tahun 2007 dengan menggelembungkan beban sebesar Rp 1,5 triliun, menggelembungkan kerugian ekspor sebesar Rp 232 miliar,

dan mengubah hasil penjualan sebesar Rp 889 milyar, sehingga laporan keuangannya menunjukkan kerugian.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masih banyak ruang untuk pertumbuhan di sektor manufaktur Indonesia. Perusahaan manufaktur termasuk industri yang memiliki resiko tinggi terhadap penghindaran pajak karena merupakan pelaku usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai pasar yang tinggi.

Fenomena tersebut terlihat pada perusahaan manufaktur seperti PT. Coca-Cola Indonesia yang melakukan penggelapan pajak. Tahun 2014 dipublikasikan di Kompas.com. Ada dugaan PT. Coca-Cola Indonesia melakukan penggelapan pajak sebesar 49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding dengan alasan dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kejadian itu terjadi pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006.

Temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan adanya pembengkakan biaya yang signifikan sepanjang tahun tersebut. Penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya mengecil ini disebabkan karena beban biaya yang besar. Beban tersebut termasuk beban iklan sebesar Rp 566,84 miliar dari tahun 2002 hingga 2006. Itu digunakan untuk mempromosikan produk minuman bermerek Coca-Cola. Ini mengurangi penghasilan kena pajak (Murkana & Putra, 2020)

Menurut DJP, seperti diberitakan surat kabar harian Kompas.com yang dirilis pada tahun 2014, total penghasilan kena pajak Coca-Cola Indonesia pada periode

tersebut sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan menurut perhitungan Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajaknya hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Dengan begitu, DJP menghitung defisit pajak penghasilan (PPh) Coca-Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar. Tentunya bagi pemerintah, hal ini sangat merugikan negara. dengan adanya fenomena ini terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak itu benar adanya. Masih banyak bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengerjakannya di Indonesia. Wajib pajak cenderung mencari cara, baik legal maupun ilegal, untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkannya (Murkana & Putra, 2020) Hal ini menimbulkan resistensi pajak dan berpotensi menjadi dasar penghindaran pajak.

Atas dasar hal-hal tersebutlah peneliti juga tertarik untuk menjadikan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi sebagai sampel dari penelitian ini. Pengaruh perusahaan dalam menyarankan penghindaran pajak yakni didorong oleh adanya hubungan politik antara perusahaan dan pemerintah. Dunia usaha sering kali memanfaatkan koneksi politik mereka untuk memajukan kepentingan bisnis mereka (Asadanie dan Venusita, 2020). Sebagai anggota dewan pemerintah pusat dan daerah, serta partai politik, pemilik bisnis adalah tokoh politik terkenal. Hal ini menunjukkan ikatan unik antara pemilik bisnis dan pemerintah. Kepemilikan saham di pemerintah juga menunjukkan ikatan politik. Bisnis yang memiliki koneksi politik menghindari pajak dengan memanfaatkan koneksi politik anggotanya sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan (Rochmat Ngabdilah *et al*, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Damayanty dan Putri, 2021) ukuran perusahaan merupakan objek pengamatan yang diperoleh dari besar kecilnya total aset yang dimilikinya karena suatu usaha dikenakan pajak. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuannya. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin stabil dengan semakin banyak aset yang dimilikinya. Sumber daya perusahaan meningkat seiring dengan ukurannya. Teori keagenan menyatakan bahwa bisnis besar harus berinvestasi pada agen remunerasi untuk meminimalkan kewajiban pajak dan mengoptimalkan operasi bisnis mereka. Produktivitas perusahaan secara keseluruhan dan keuntungannya dapat dipengaruhi oleh ukuran asetnya. Besarnya pajak yang dibayarkan oleh bisnis dengan basis aset yang signifikan dipengaruhi oleh keuntungannya (Oktavia *et al*, 2021).

Selain itu, kualitas audit memainkan peran penting dalam menghentikan penghindaran pajak. Menurut (Setyawan SE, 2020), terdapat korelasi yang kuat dan positif antara pengurangan pajak dengan ukuran perusahaan. Total aset suatu perusahaan menunjukkan ukurannya. Bisnis dengan total aset yang besar dapat dengan mudah menggunakannya untuk menyelesaikan tugas atau tujuan tertentu, sehingga memungkinkan mereka menjadi ahli dalam berbagai aktivitas yang dapat menyebabkan rendahnya pembayaran pajak dan tindakan perpajakan selanjutnya. Selain itu, peraturan perpajakan lebih sering digunakan oleh perusahaan besar untuk melakukan tindakan perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik, serta kualitas audit pada penghindaran pajak (*tax*

avoidance) di antaranya hasil analisis oleh (Asadanie & Venusita, 2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Stawati, 2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Shintawati & Pandoyo, 2022) menyebutkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 39.5% terhadap *tax avoidance*.

Peneliti memiliki ketertarikan dalam mencari tahu beberapa faktor pengaruh pada penghindaran pajak, didasarkan pada beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai praktik tersebut. Guna menguji serta menemukan bukti empiris pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan serta kualitas audit pada penghindaran pajak adalah tujuan yang dipilih peneliti. Dalam hal ini perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang ada di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018-2021 dijadikan sebagai objek oleh peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti mengambil beberapa masalah, didasarkan pada latar belakang serta identifikasi masalah yang ada :

1. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh pada penghindaran pajak ?
2. Apakah Koneksi Politik memiliki pengaruh pada penghindaran pajak?
3. Apakah Kualitas Audit memiliki pengaruh pada penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti mengambil beberapa tujuan, didasarkan pada latar belakang penelitian yang dipaparkan sebelumnya :

1. Berguna untuk menguji serta melakukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022
2. Guna melakukan pengujian dan penemuan bukti empiris koneksi politik pada penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022
3. Guna menguji serta menemukan bukti empiris pengaruh kualitas audit pada penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Pada berbagai pihak, penelitian ini sangat diharapkan kebermanfaatannya, yakni :

1. Investor

Hasil dari analisis tersebut mampu menjadi rekomendasi investor ketika mengambil keputusan guna melakukan investasi ataupun ketika memilih perusahaan tujuan dalam melakukan investasi.

2. Pemerintah

Hasil dari analisis ini bisa dijadikan tambahan informasi serta evaluasi untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) khususnya di Direktorat Jendral Pajak Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency theory*

Gagasan tentang hubungan agen dalam konteks manajemen dan pemegang saham disajikan oleh teori keagenan. Mereka mendefinisikan hubungan sebagai suatu perjanjian dimana satu atau lebih pihak (*principal*) memperkerjakan pihak lain (*agent*). Memberi mereka dukungan berarti memberi agen kekuatan untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Dengan adanya kebebasan dan dorongan untuk mengikuti kepentingan mereka sendiri bahkan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham, manajer dapat mengelola perusahaan secara efektif dalam keadaan seperti ini (Abdelmoula *et al*, 2022).

Ditambahkan oleh (Davis *et al*, 2018) inti dari teori keagenan adalah principal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama mereka. Agen secara oportunitis dapat meningkatkan utilitasnya sendiri dengan mengorbankan utilitas (kekayaan) prinsipal berkat pendeglegasian ini. Untuk mengurangi penyalahgunaan deglegasi, teori keagenan menciptakan kondisi pendeglegasian perantara yang melibatkan pendeglegasian terlebih dahulu dan kemudian pengendalian.

Menurut (Chouaibi *et al*, 2022), teori ini dapat diterapkan pada inisiatif CSR. Dengan mendorong manajer untuk secara sukarela memberikan lebih banyak

informasi, VD dapat membantu manajer dalam penyelesaian masalah keagenan. Hal ini dapat menurunkan biaya agensi dan memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna bahwa manajer bertindak sebaik mungkin. Pengungkapan ini dianggap sebagai komponen platform pemantauan untuk mengurangi asimetri informasi dan masalah biaya terkait lembaga. Meskipun CSR dapat membantu menyelesaikan masalah keagenan, para manajer juga dapat menyalahgunakannya dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan pribadi.

Praktik penghindaran pajak jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan adanya konflik, hal ini merupakan hubungan teori agensi dengan penelitian ini. Hal tersebut karena adanya perbedaan kepentingan laba *principal* (pemegang saham/investor) dengan *agent* (manajer). *Agent* memiliki keinginan adanya nilai perusahaan yang tinggi guna menarik minat investor dalam pelaksanaan penghindaran pajak. Karena laba yang didapat oleh perusahaan, diambil dari penghindaran pajak, *agent* memiliki anggapan bahwa ia akan mendapatkan kesejahteraan karena untung akan maksimal ketika ditarik oleh investor dan hal tersebut bisa melakukan pemaksimalan nilai perusahaan. Disisi lain, *principal* memiliki keinginan laba yang besar tetapi dengan menerapkan manajemen yang baik pada perusahaan. Konflik antar pengguna disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda ini.

2.1.2 Stakeholder theory

Untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan di era modern akan lebih fokus pada seluruh pemangku kepentingan dibandingkan hanya sekedar pemegang saham. Selain kewajiban etis, hal ini berdampak pada menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya teori ini dikembangkan dari sudut pandang bisnis yang mencakup seluruh pemangku kepentingan.

Stakeholder theory berpendapat bahwa manajer mempunyai kewajiban moral untuk mempertimbangkan dan secara adil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Teori ini sangat menekankan pada akuntabilitas manajer terhadap pemangku kepentingannya. *Stakeholder* adalah orang atau kelompok yang sesuai dengan keputusan atau tindakan perusahaan, merasa dirugikan atau diuntungkan. Kelompok konstituen yang lebih besar dari pemegang saham juga dipertimbangkan. Pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi delapan kategori : pemerintah, komunitas, politisi, pemasok, karyawan, pelanggan, dan asosiasi profesi (Chouaibi *et al*, 2022).

Pemegang saham akan menganggap perusahaan dengan laba per saham lebih tinggi lebih menarik. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengalami penurunan biaya dan peningkatan laba bersih, inilah hubungan keduanya. Semakin banyak modal yang ditanam investor, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa laba bersih yang lebih tinggi yang dibagikan kepada pemangku kepentingan.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Damayanty dan Putri, 2021) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan strategi sah yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar guna menghindari pembayaran pajak. Pendekatan ini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang tidak melanggar hukum. Menggunakan undang-undang perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan secara sah oleh bisnis adalah salah satu metode untuk menghindari pembayaran pajak. Meskipun APBN digunakan untuk mendanai inisiatif pemerintah dan pembangunan gedung-gedung publik, namun keputusan seperti ini dapat mempengaruhi pemungutan pajak negara dan mengakibatkan berkurangnya pendanaan APBN. Pembangunan akan terhambat jika APBN terganggu. Badan usaha yang menaati peraturan perundang-undangan perpajakan sekaligus mengurangi kewajiban perpajakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu strategi untuk meminimalkan istilah-istilah yang digunakan dalam pajak adalah perencanaan pajak. Ditambahkan oleh (Ernawati *et al*, 2019) karena penghindaran pajak mengalihkan kekayaan dari pemerintah ke dunia usaha, maka hal itu seharusnya meningkatkan nilai perusahaan. Penting untuk ditekankan bahwa perusahaan tidak selalu bertindak tidak rasional ketika mereka menghindari pembayaran pajak. Penggunaan strategi hukum yang sama untuk mengurangi atau bahkan menghindari pembayaran pajak merupakan hubungan umum antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Dengan mengetahui aturan sistem perpajakan dari berbagai pihak, penghindaran pajak dapat berkisar antara mengurangi beban pajak dan pelanggaran hukum perpajakan (Qawqzeh, 2023) .

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Size merupakan ukuran perusahaan jika dilakukan penentuan melalui total aset perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya yang disajikan melalui jumlah penjualan, total aset, atau penjualan rata-rata yang ada pada ukuran perusahaan.

Total aset suatu perusahaan menunjukkan kematangannya. Prospek perusahaan dalam jangka panjang relatif lebih baik jika total neracanya semakin besar. Basis total aset yang besar akan meningkatkan pendapatan dan mempengaruhi kewajiban perpajakan. Bisnis yang lebih besar biasanya menggunakan teknik akuntansi yang efektif seperti biaya penyusutan akibat biaya perolehan aset dan memiliki lebih banyak ruang untuk perencanaan pajak strategis. Tujuannya adalah untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Dalam hal memperoleh keuntungan dan membayar pajak, perusahaan besar lebih dapat diandalkan dibandingkan perusahaan kecil. Menurut (Damayanty dan Putri, 2021) sebaiknya total aset suatu perusahaan berada pada ukuran idealnya. Suatu perusahaan mungkin berada dalam tahap matang jika nilai asetnya tinggi, dan mungkin juga memiliki masa depan yang baik dan stabil jika arus kasnya kuat dan dapat mengungguli perusahaan-perusahaan kecil dalam pendapatan.

2.1.5 Koneksi Politik

Suatu perusahaan dianggap mempunyai koneksi politik apabila salah satu pengurus atau pemegang sahamnya merupakan anggota legislative (Prapita dan Safrida, 2019). Ditambahkan oleh (Rustriarini dan Sudiartana, 2021) mengatakan bahwa dewan pengarah perusahaan yang memiliki ikatan politik diketahui terlibat dalam

aktifitas penghindaran pajak pada tingkat yang lebih tinggi sebab mereka tidak tunduk pada peraturan yang ketat dan mempunyai peluang lebih besar untuk menghindari pembayaran pajak. Ditambahkan oleh (Suhardianto & Putra 2020) pada penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan politik manajemen mungkin berdampak pada strategi bisnis. Pengalaman politik mungkin mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak karena manajemen perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman politik yang dapat memengaruhi kesetiaan perusahaan kepada pemerintah. Loyalitas manajemen terhadap pemerintah akan berdampak pada strategi perusahaan yang kurang agresif dan hemat pajak.

2.1.6 Kualitas Audit

Faktor selanjutnya yang dinyatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Alfandia, 2023) mengatakan bahwa dalam hal ini, kualitas audit merupakan komponen yang penting yang perlu diperhatikan. Kemampuan auditor dalam melaksanakan tugasnya secara profesional berdasarkan kompetensi, indepedensi, dan etika profesi ditingkatkan oleh kualitas audit. Selain itu, kualitas audit yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan bahwa auditor akan menemukan kelemahan material atau laporan keuangan yang tidak tepat. Ditambahkan oleh (Amalia & Ferdiansyah, 2019) skenario apa pun yang mungkin timbul ketika auditor menelaah laporan keuangan klien, mencari pelanggaran, dan

memberi tahu pihak yang diaudit mengenai pelanggaran tersebut termasuk dalam kualitas audit. Perusahaan di sektor keuangan akan mempercayakan prosedur auditnya kepada auditor yang berkualitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nedya & Lestari, 2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak diduga ada kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan. Kinerja auditor dalam menelaah laporan keuangan sesuai dengan standar Profesioanal Akuntan Publik dan Kode Etik Auditor diukur dari kualitas audit. bisnis dengan kualitas audit tinggi tidak melakukan penghindaran pajak melalui cara-cara manipulatif. Ditambahkan oleh (Noviani & Monica, 2021) Kualitas audit merupakan ukuran kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Kode Etik Auditor dan Standar Profesional Akuntan Publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-yang dilakukan oleh (Sulaeman, 2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang dapat dikatakan positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak meningkat seiring dengan ukuran dan profitabilitas perusahaan, meskipun *leverage* memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap penghindaran pajak dalam

penelitian ini. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa penghindaran pajak menurun seiring dengan meningkat leverage.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Asidanie & Venusita, 2020) yaitu guna untuk menguji pengaruh koneksi politik pada penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2015-2017 menunjukkan hasil penelitian bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terkait pengaruh komisaris independent serta kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang termasuk dalam indeks saham LQ45 pada (2014-2018) yang dilakukan oleh (Tamara & Saragih, 2021) menemukan hasil yaitu pada hasil regresi linear berganda menunjukkan terdapat nilai konstanta sebesar 0,337 untuk peneraoan komisaris independent dan kualitas audit dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Pengaruh komisaris independent terhadap penghindaran pajak adalah negatif sebesar 0.0003. namun demikian, karena $0,003 < 0,023$ yang merupakan nilai signifikan bagi komisaris independent, maka hubungan ini tidak signifikan. Penghindaran pajak dan kualitas audit mempunyai hubungan positif, namun tidak signifikan secara statistic ($p < 0,001$). Berdasarkan temuan penelitian, kita dapat menyimpulkan bahwa akan semakin sedikit kasus penghindaran pajak jika semakin tinggi presentase komisaris independent. Selain itu, praktik penghindaran pajak meningkat seiring dengan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tahilia *et al*, 2022) yang berjudul pengaruh komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya (Fediansyah & Amalia 2019), menyelidiki apakah koneksi politik, karakteristik kepemimpinan, dan kualitas audit mempengaruhi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013–2017. Penelitian mengungkapkan 51 perusahaan yang memenuhi kriteria hingga populasi 165 perusahaan sehingga menghasilkan sampel sebanyak 255 observasi selama periode lima tahun. Data penelitian ini diperiksa dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel. Dalam penelitian ini, aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan dinyatakan sebagai cash ETR. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh koneksi politik, yang menunjukkan bahwa dunia usaha biasanya menggunakan koneksi ini untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. mengenai penghindaran pajak, karakteristik kepemimpinan tidak memiliki dampak yang terlihat. Artinya, faktor yang menentukan perilaku penghindaran pajak tidak dapat ditentukan oleh karakter kepemimpinan seseorang. Terlihat dari variabel kualitas audit bahwa penghindaran

pajak tidak terpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, tidak mungkin KAP *big four* berkualitas tinggi dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu bisnis tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prapitasari & Safrida (2019) yang berjudul *The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance (empirical study on mining companies listed in Indonesia stock exchange 2015-2017)* penelitian ini menggunakan data perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 dan menggunakan jumlah sampel sebanyak empat puluh sampel. Selama tiga tahun pengamatan, perusahaan menggunakan analisis regresi dengan statistic sebagai metode analisis data, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang kuat akan menurunkan pajak. Leverage, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan intensitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dunia usaha memperhitungkan dampak jangka panjangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidaruk & Fadilah (2020) yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti kualitas audit, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2016 hingga 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian berjumlah 216 titik data observasi atau 72 perusahaan dipilih dengan menggunakan

metode purposive sampling. Bursa Efek Indonesia menyediakan datanya. Analisis regresi logistic dan analisis statistic deskriptif diterapkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berdampak positif.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Skala atau nilai yang dikenal sebagai “ukuran perusahaan” dapat digunakan untuk mengklasifikasi bisnis kedalam kelompok besar atau kecil berdasarkan total aset dan variabel lainnya. Total aset suatu perusahaan menunjukkan ukuran dan kompleksitas transaksinya, yang keduanya meningkat seiring bertambah ukurannya. Hal ini memungkinkan dunia usaha mendapatkan keuntungan dari peluang menghindari pembayaran pajak pada setiap transaksi. Perusahaan yang beroperasi diluar negeri biasanya berukuran lebih besar dibandingkan dalam negeri, dan mereka juga cenderung melakukan penghindaran pajak pada Tingkat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan mereka untuk memindahkan keuntungan mereka ke bisnis di negara lain, yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan besar memiliki kegiatan operasi yang lebih banyak sehingga menggunakan kesempatan guna melakukan *tax avoidance*. Semakin besar jumlah laba bersih perusahaan, maka tarif pajak tentu akan lebih besar sehingga itu akan semakin mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sulaeman, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa semakin besar perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik dampaknya terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak meningkat seiring dengan ukuran dan profitabilitas perusahaan.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hubungan dari teori yang ada bahwasannya skala perusahaan atau ukuran perusahaan bisa memberikan pengaruh pada hal tersebut. Keinginan mendapatkan laba dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dan hal tersebut berbanding lurus dengan adanya pemegang saham yang juga menginginkan deviden yang besar, sehingga terjadilah praktik penghindaran pajak.

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pemilihan jasa auditor yang akan memberikan hasil dengan kualitas yang lebih tinggi sebagian besar bergantung pada kualitas audit. Untuk menjamin keakuratan data yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan, dunia usaha memerlukan auditor. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas merupakan sikap-sikap yang menentukan kualitas suatu audit. untuk menjaga reputasi mereka sebagai auditor, auditor berkualitas tinggi biasanya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja, integritas dan transparansi mereka (Aysha & Sari, 2022). Hal ini menjadi faktor pengaruh bahwa semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suciana & Setiawan, 2018), bahwa kualitas audit diukur menggunakan ROA,

apabila ROA berada di antara benchmark menandakan kualitas audit baik dan apabila ROA berada di luar benchmark menandakan kualitas audit buruk.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sidaruk & Fadilah, 2020) mengatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zealio Doho & Budi Santoso, 2020) mengatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan. Peneliti mengembangkan hipotesis berikut :

H2: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Kehadiran anggota BOD (*board of directors*) dan boc (*board of commissioner*) menentukan koneksi politik. Perusahaan dikategorikan sebagai koneksi politik apabila ada salah satu BOD atau BOC yang merupakan anggota partai politik karena dianggap memiliki kedekatan dengan pemerintahan yang memicu tindakan *tax avoidance*. Toleransi antara kedua pihak mencerminkan hubungan dengan pemerintah. Berbagai keuntungan yang didapat dari hubungan ini yakni pemeriksaan pajak yang tidak ketat, yang menyebabkan perusahaan berani untuk melakukan *tax avoidance* karena merasa dilindungi dari koneksi politik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yongbo Li dkk, 2018) menunjukkan bagaimana dewan direksi dapat memanfaatkan keuntungan dari peluang pengalihan laba, pengalihan laba mungkin merupakan cara yang paling mungkin dilakukan oleh perusahaan untuk terus menghindari pajak. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan hambatan besar dalam keberhasilan penegakan

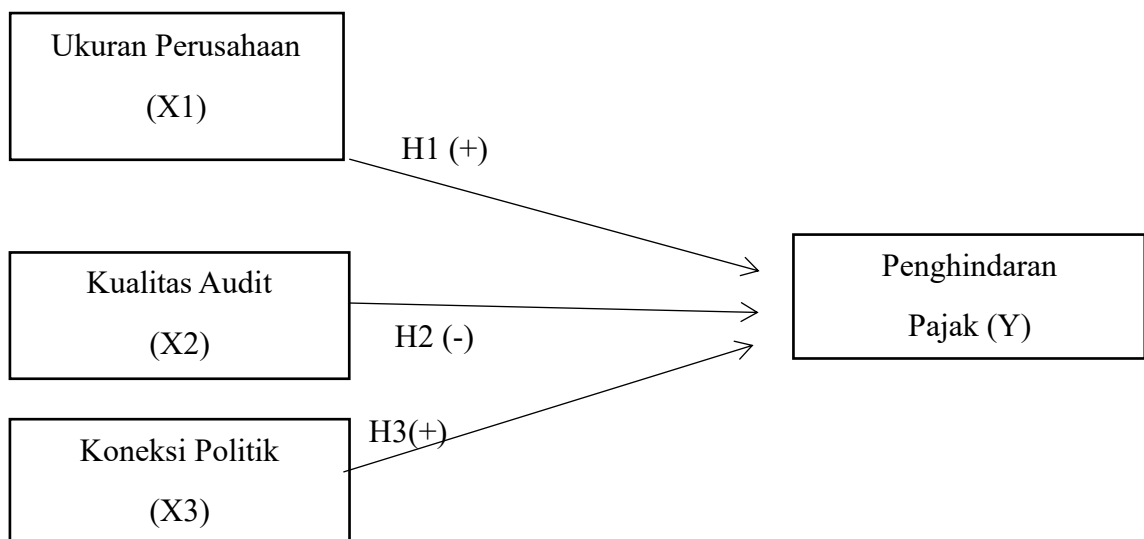
kepatuhan pajak di negara-negara yang memiliki kontrol politik, hubungan antara dewan direksi dan politisi. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prapitasari & Safrida, 2019) yang mengatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan dibuktikan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh koneksi politik. Perlindungan power yang diberikan oleh pemerintah menjadikan perusahaan berani melakukan *tax avoidance*.

H3: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis di atas, maka penelitian ini memiliki kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi merupakan objek yang memiliki karakteristik untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi terdiri dari sektor makanan dan minuman, sektor farmasi, sektor rokok, sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, sektor peralatan rumah tangga dan sub sektor lainnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2018-2021 merupakan populasi yang digunakan. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi mempunyai masukan maksimal dalam tumbuh kembang ekonomi di Indonesia, namun masih belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, hal ini yang menjadikan perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi menjadi populasi dalam penelitian.

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain masalah yang dihadapi penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, hipotesis penelitian yang dikembangkan, serta metode penelitian dan alat penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti disebut *purposive sampling*. Metode ini dapat dikatakan tepat dikarenakan penelitian ini memiliki beberapa kriteria khusus sehingga tidak semua laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek

Indonesia (BEI) dapat menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam mengambil sampel, ada beberapa kriteria yang digunakan yakni:

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang IPO dibawah tahun 2018.
3. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang tidak mengalami kerugian secara berturut turut selama periode tahun 2018-2022
4. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang telah melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dan lengkap untuk tahun 2018-2022.
5. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian jenis kuantitatif dimanfaatkan oleh peneliti.. Sumber data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian sekunder dengan teknik mengumpulkan data yakni sesi dokumentasi dan beberapa dokumen serta data terkait laporan tahunan (*annual report*) digunakan oleh peneliti pada analisis ini. Laporan tahunan pada perusahaan sektor manufaktur barang konsumsi pada 2018-2021 yang ada di BEI merupakan sumber data yang dipilih oleh peneliti.

3.3 Definisi Oprasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dipelajari untuk mendapatkan informasi dan kesimpulan yang terkait. Penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu variabel independent dan variabel dependen. Penelitian ini mencakup tiga variabel independent : koneksi politik, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

3.3.1 Variabel Independen

Dijelaskan lagi oleh (Ulfa Rafika, 2021), variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain secara teoritis atau sebab akibat. Karakter biasanya digunakan untuk menggambarkan variabel independen.

(X) merupakan lambang dari variabel ini, variabel independent didalam penelitian ini :

3.3.1.1 Ukurann Perusahaan

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Erna *at all*, 2020) mengatakan tiga kategori digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan yaitu, perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh total asetnya. Prospek jangka Panjang yang lebih baik bagi suatu perusahaan ditunjukkan dengan total neraca yang lebih tinggi. Dibandingkan bisnis dengan total aset yang lebih kecil, bisnis dengan aset lebih besar lebih menguntungkan dan stabil.

Berikut merupakan rumus dalam menghitung ukuran perusahaan :

Ukuran Perusahaan = $\ln$ (total aset)

(Mahpudin & Aulia, 2020)

3.3.1.2 Kualitas Audit

Menurut (Santoso & Doho, 2020). Salah satu teknik untuk mengelola perilaku manajer dalam manajemen bisnis dan untuk mengidentifikasi serta menghentikan penipuan akuntansi adalah kualitas audit. dalam mengvaluasi laporan keuangan perusahaan, auditor eksternal diharapkan dapat menentukan apakah perusahaan menerapkan perpajakan secara agresif, suatu posisi yang berada pada wilayah abu-abu yang terlihat oleh otoritas pajak. Dalam penelitian ini *earnings surprise benchmark* dijadikan sebagai proksi kualitas audit (Suciana & Setiawan, 2018), yaitu agar dapat mendeteksi dan mengungkapkan adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian. Menurut (Suciana & Setiawan, 2018), kualitas audit dibagi dalam 2 kategori yaitu :

- a. Kualitas audit tinggi (MEET_BE=1) bila nilai laba berada dalam rentang nilai yang normal.
- b. Kualitas audit rendah (MEET_BE=0) bila nilai laba berada diluar rentang nilai yang normal. Asumsi kualitas audit rendah jika :
 - i. Laba melebihi earning benchmark yaitu nilai $ROA > \mu - \sigma$
 - ii. Rugi melebihi earning benchmark yaitu nilai $ROA < \mu - \sigma$

Untuk mengukur kualitas audit maka digunakan rumus ROA, dengan cara melihat ROA berada dalam benchmark ataukah tidak. Jika ROA berada di dalam benchmark ($\mu - \sigma < ROA < \mu + \sigma$) maka menandakan bahwa kualitas audit baik. Sedangkan jika ROA berada diluar benchmark ($ROA > \mu + \sigma$) atau ($ROA < \mu - \sigma$) maka menandakan kualitas audit buruk. Dimana μ adalah rata-rata ROA seluruh Perusahaan sampel dan σ adalah deviasinya. Semakin KAP memiliki kualitas audit yang baik maka akan membuat klien semakin percaya terhadap jasa yang diberikan. Kualitas audit yang baik akan diberikan nilai 1, sedangkan kualitas audit yang buruk akan diberikan nilai 0. Variabel ini dilambangkan dengan **KA**.

3.3.1.3 Koneksi Politik

Perusahaan menjadi lebih proaktif dalam kebijakan perpajakannya karena adanya berbagai kistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang

memiliki koneksi politik, perlindungan dari pemerintah, kemudahan akses pinjaman untuk pembelian saham, dan menurunnya resiko pemeriksaan pajak. Suatu organisasi akan lebih mungkin melakukan penghindaran pajak jika makin kuat koneksi politiknya (Sofie & Sembiring 2022). Jika setidaknya pemegang saham utama (yang memegang setidaknya 10% dari total saham perusahaan) berhubungan dengan tokoh atau partai politik, maka perusahaan tersebut dikatakan mempunyai ikatan politik. Selanjutnya, apabila pimpinan perusahaan mempunyai hubungan dengan seseorang atau partai politik, menjadi Menteri, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka perusahaan tersebut juga dianggap mempunyai hubungan politik (Sulisyowati & Prabowo, 2020). *Dummy* digunakan dalam mengukur variabel ini, dengan menggunakan skor. Jika perusahaan tidak terkoneksi politik skor nya 0, jika Perusahaan terkoneksi politik diberi skor 1.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang berubah secara struktural karena adanya perubahan variabel lain. Variabel terikat inilah yang menjadi kepentingan atau permasalahan utama bagi peneliti dan menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang kehadirannya mewakili hasil dari variabel bebas (Ulfa Rafika, 2021). Berikut adalah variabel dependen dalam penelitian ini.

3.3.2.1 Penghindaran Pajak

Menurut (Prasetyo C & Abdillah, 2021) penghindaran pajak bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang pembelanjaan. Penghindaran pajak adalah tindakan mengelola peristiwa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, dengan memperhatikan ada tidaknya implikasi pajak. Tidaklah tepat untuk mengurangi, menghindari, membatasi atau menurunkan tarif pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pada penelitian ini penghindaran pajak merupakan variabel dependen. Penghindaran pajak akan dihitung melalui CETR. Perhitungan melalui CETR yang dapat mengidentifikasi antara pajak rill yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak.

Berikut merupakan rumus untuk menghitung CETR :

$$CETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

(Fitri, A.W, 2024)

3.4 Teknik pengujian data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Guna mencari tahu serta melakukan uji kelayakan model regresi pada suatu penelitian digunakan uji asumsi klasik. Empat pengujian pada proses uji yakni :

3.4.1.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018), prosedur uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel, baik dependen maupun independent, berdistribusi normal atau tidak. Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam analisis ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Nilai signifikan yang lebih besar dari 0.05% menunjukkan bahwa sebaran datanya normal. Sedangkan data tidak terdistribusi normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05%.

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Tahap uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independent dalam persamaan regresi. Toleransi dan VIF dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya setiap variabel independen dalam penelitian mempunyai korelasi atau hubungan satu sama lain. Ditambahkan oleh (Ghozali, 2018), jika nilai toleransi lebih besar dari setara 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka penelitian tersebut terbebas dari karakteristik multikolinearitas

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji *glejser* digunakan dalam kegiatan penelitian untuk mengetahui bebas atau tidaknya data penelitian dari gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji adanya ketidaksamaan varians melalui residu antar observasi lain dalam model

regresi. Sepanjang nilai signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0.05% maka tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas pada data. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 5% atau 0.05% maka terjadi heteroskedastisitas pada data.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018), dalam menguji adanya hubungan kesalahan untuk periode masa kini yang dibandingkan dengan kesalahan dalam periode yang lalu digunakanlah proses uji autokorelasi. Berikut ketentuan melakukan proses uji Durbin Watson pada penelitian ini:

$d_u < d < 4 - d_u$ = Tidak ditemukan adanya autokorelasi

$d < d_l$ = Tidak ditemukan adanya autokorelasi positif

$d > 4 - d_l$ = Tidak ditemukan adanya autokorelasi negative

$d_l < d < d_u$ = Tidak ditemukan adanya keputusan mengenai autokorelasi

$4 - d_u < d < 4 - d_l$ = Tidak ditemukan adanya keputusan mengenai autokorelasi

3.5 Teknik Analisis Data

Metode regresi linear secara berganda dimanfaatkan pada penelitian yang dilakukan dalam menguji hipotesis. Menurut (Ghozali, 2018), tahap analisis regresi linear berganda tidak hanya mengukur kekuatan korelasi antara dua variabel atau lebih, namun juga menunjukkan arah korelasi antara variabel independen dan dependen.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta apakah setiap variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Hal ini juga bertujuan untuk memperkirakan apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan berdasarkan variabel dependen.

Berikut persamaan analisis regresi linear berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X1 = Ukuran Perusahaan

X2 = Kualitas audit

X3 = Koneksi politik

E = Tingkat kesalahan penduga pada penelitian

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozal, 2018), gambaran pada kriteria nilai maksimum, minimum, standar deviasi maupun rata-rata ditunjukkan pada statistik deksriptif. Dalam mempermudah memahami beberapa variabel pada penelitian, digunakan

pengujian ini. Disajikan ukuran numerik yang begitu penting bagi sampel pada uji ini.

3.5.2 Uji F

Tujuan uji F adalah untuk menunjukkan kesesuaian atau kelayakan model regresi untuk digunakan. Dengan menggunakan ambang signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), pengujian ini digunakan untuk mengetahui cara pengolahan data regresi dengan memeriksa nilai output pada tabel *anova*. Model regresi dianggap tidak cocok jika nilai probabilitas melebihi tingkat signifikan α . Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi dapat digunakan atau layak.

3.5.3 Uji T

Sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual guna menerangkan variasi variabel dependen ditunjukkan menggunakan uji statistik-t. Ditambahkan (Ghozali, 2018), variabel bebas dalam artian individual melakukan pengaruh pada variabel terikat dibuktikan dengan signifikannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang melakukan pengujian pengaruh ukuran Perusahaan, kualitas audit, dan koneksi politik dalam penghindaran pajak dibahas dalam bab ini. Software SPSS versi 23, digunakan dalam mengolah hasil dari analisis peneliti dan kemudia disajikan berupa asumsi klasik, uji statistika deskriptif, serta uji regresi linear berganda.

Tabel 4.1

Perolehan data sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI sejak tahun 2018-2022.	113
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang IPO tahun 2018 ke atas.	(47)
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut dan lengkap untuk tahun 2018-2022.	(2)
Perusahaan yang mengalami kerugian secara berturut turut selama tahun 2018-2022.	(33)

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran ini nilai mata uangnya sama	(1)
Jumlah Perusahaan yang memenuhi syarat	31
Tahun pengamatan	5
Jumlah sampel penelitian	155

Sumber: www.idx.co.id

4.2 Teknik Pengujian Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Penelitian yang dilakukan, mengadaptasi Teknik uji normalitas pada data berdasar pada uji *Kolmogorov Smirnov* (KS) melalui *software* SPSS. Ketentuan pengambilan Keputusan untuk uji normalitas KS yaitu :

- a. Bila angka signifikansi menunjukkan > 0.05 , diinterpretasikan distribusi bersifat normal.
- b. Bila angka signifikansi menunjukkan < 0.05 , diinterpretasikan data tidak distribusi normal.

Melalui pengujian *Kolmogorov Smirnov* (KS), hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04066160
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.058
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2- tailed)		.200
Sumber : Data diolah, 2024		

Nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0.05 yakni 0,200 hal ini didasarkan pada hasil uji normalitas pada 155 sampel dengan memanfaatkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dengan ini menunjukkan data telah terdistribusi normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan sebagai langkah pengujian dalam kemungkinan model regresi memiliki hubungan terhadap variabel independent. Guna mencari tahu apakah model regresi yang digunakan mengalami multikolinearitas atau tidak. Peneliti dapat melihatnya dari nilai *tolerance* Dimana harus melebihi angka 0,1 serta nilai *variance inflation factor* (VIF) yang harus kurang dari angka 10.

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ukuran Perusahaan	.930	1.075
Kualitas Audit	.989	1.011
Koneksi Politik	.931	1.074

Sumber : Data diolah, 2024

Keseluruhan variabel mengindikasikan nilai tolerance sebesar $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 , didasari pada hasil uji diatas yang mana menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas pada setiap variabel yang di uji.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Guna melakukan pengujian adanya ketidaksamaan pada variance residual pada keseluruhan observasi pada persamaan regresi digunakan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini memakai uji *glejser* guna mengetahui apakah model regresi penelitian telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau tidak. Apabila perolehan nilai probabilitas atas signifikansi sebesar (sig) $> 0,05$, sebuah model regresi bisa dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.4**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Sig.
1 (Constant)	.108
Ukuran	.297
Perusahaan	
Kualitas Audit	.588
Koneksi Politik	.594

Sumber : Data diolah, 2024

Nilai probabilitas signifikansi (sig) dari kelima variabel $> 0,05$, didasarkan pada hasil uji glejser dalam uji heterokedastisitas. Yang membuktikan bahwa data telah terlepas dari gejala heteroskedastisitas.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Sebagai Langkah korelasi pada beberapa kesalahan perancu pada periode t ataupun periode sebelumnya, dilakukan uji korelasi. Uji Durbin-Watson digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

Tabel 4.5**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.398 ^a	.158	.151	.03340	1.916

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil tabel menunjukkan jika perolehan hasil Durbin-Watson ialah sebesar 1.916. Maka bisa dikatakan tidak ada gejala autokorelasi dikarenakan perolehan nilai Durbin-Watson berada diantara 1.916 dan 2.2341 ($1.7659 < 1.916 < 2.2341$).

4.3 Teknik Analisi Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Pada penelitian yang dilakukan terdapat 2 jenis statistic deskriptif yaitu statistik deskriptif bersekala rasio dan bersekala nominal. Statistik deskriptif bersejala rasio terdiri dari Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*. Sedangkan statistik bersekala nominal terdisi dari Kualitas Audit dan Koneksi Politik.

Tabel 4.6

Hasil Statistik Deskriptif Berskala Rasio

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	155	27.34	32.83	29.5140	1.51750
Tax Avoidance	155	.04	.33	.2318	.04589
Valid N (listwise)	155				

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 4.7**Hasil Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dummy**

Variabel	Kriteria	Kode	Jumlah	Sampel
Koneksi Politik	Perusahaan yang melakukan koneksi politik	1	50	32%
	Perusahaan yang tidak melakukan koneksi politik	0	105	68%
	Total		155	
Kualitas Audit	Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik	1	124	80%
	Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang buruk	0	31	20%
	Total			

Sumber : Data diolah, 2024

Table 4.7 menunjukkan nilai *mean tax avoidance* yang memiliki tingkat proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 0,2318 serta nilai standar deviasi bernilai 0,04589 nilai *mean* melebihi standar deviasi, membuktikan bahwa nilai maximum pada data *tax avoidance* yang dimiliki oleh Perusahaan (SDPC) 2018 adalah 0,33. Sedangkan nilai minimum dari data *tax avoidance* adalah 0,04 dari perusahaan Sekar Laut TBK (SKLT) pada tahun 2019 adalah 0,04.

Nilai ukuran perusahaan memperoleh perolehan nilai *mean* menunjukkan angka 29.5140 dan nilai standar deviasi sebesar 1.51750. data berkelompok dibuktikan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Perusahaan PT Sekar Laut TBK memiliki nilai minimum 27,34, sedangkan PT Imdofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki nilai maksimum 32,83 pada 2022.

Table 4.8 menunjukkan variabel koneksi politik menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria apabila perusahaan melakukan koneksi politik akan ditunjukkan dengan skor 1, tetapi apabila perusahaan tidak melakukan koneksi politik akan ditunjukkan dengan skor 0. Berdasarkan pada table 4.8 perusahaan dengan koneksi politik sebanyak 50 sampel atau 32% dari total sampel, jika dilakukan perbandingan dengan perusahaan yang tidak ada koneksi politik hal ini lebih kecil yakni sebesar 68% dari sampel.

Variabel dummy dengan kriteria jika perusahaan memiliki kualitas audit yang baik yaitu jika ROA berada di dalam benchmark ($\mu - \sigma < ROA < \mu + \sigma$) diberikan skor 1, dan jika perusahaan memiliki kualitas audit yang buruk yaitu jika ROA berada diluar benchmark ($ROA > \mu + \sigma$) atau ($ROA < \mu - \sigma$) diberikan skor 0. Berdasarkan table 4.8 sebanyak 124 sampel atau 80% dari total sampel memiliki kualitas audit yang baik, hal ini lebih besar yakni 31 sampel atau 20 % dari total sampel yang memiliki kualitas audit yang buruk.

4.3.2 Uji F

Tabel 4.8

Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	.2.288	.024 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber : Data diolah,2024

Nilai signfikansi dari model regresi penelitian sebesar 0,024 ditunjukkan oleh hasil perhitungan uji diatas. Jika dibandingkan dengan α yang bernilai 0,05, maka signifikansi F (0,024) < 0,05. Itu membuktikan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dibandingkan 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka menunjukkan bahwa nilai regresi tersebut layak digunakan untuk penelitian ini.

4.3.3 Uji T

Tabel 4.9

Hasil Uji T

Model		Unstandardi zed Coefficients B	T	Sig.
1	(Constant)	.110	2.151	.033
	Ukuran Perusahaan	.004	2.225	.028
	Kualitas Audit	.006	.865	.389
	Koneksi Politik	.008	1.348	.180

Sumber : Data diolah, 2024

Menurut tabel 4.10, maka pengaruh dan korelasi pada variabel tinjauan X dan variabel Y, dapat disimpulkan yaitu :

- a. Nilai sig dari ukuran perusahaan adalah 0,028, hal ini menandakan bahwa nilai sig $0,028 < 0,05$ dengan itu diambil kesimpulan H1 diterima, karena penghindaran pajak mempengaruhi ukuran perusahaan.
- b. Nilai sig dari kualitas audit adalah 0,389, hal ini menandakan bahwa nilai sig $0,389 > 0,05$ dengan itu diambil kesimpulan H2 ditolak, karena penghindaran pajak tidak mempengaruhi kualitas audit.
- c. Nilai sig dari koneksi politik adalah 0,180, hal ini menandakan bahwa nilai sig $0,180 > 0,05$. Dengan itu diambil kesimpulan H3 ditolak, karena penghindaran pajak tidak mempengaruhi koneksi politik.

4.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Berikut ini adalah table yang menunjukkan hasil rekapitulasi uji hipotesis:

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	B	Sig	Keputusan
H1	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak	0.004	0.028	Didukung
H2	Kualitas audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.	0.006	0.389	Tidak didukung

H3	Koneksipolitik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran	0.008	0.180	Tidak didukung
----	--	-------	-------	----------------

4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama yang menduga bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak didukung. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, karena mereka dapat mempekerjakan spesialis pajak atau menyewa konsultan pajak, yang dapat meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan. Karena laba yang besar mengakibatkan beban pajak yang semakin besar, maka perusahaan dengan laba yang besar dan stabil akan mendorong karyawannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Bisnis besar juga memiliki banyak aset, sehingga meningkatkan kewajiban mereka. Ini selaras pula dengan analisis yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidaruk & Fadilah (2020), yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak

karena semua Perusahaan, berapa pun ukurannya, wajib membayar pajak kepada negara.

4.4.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua yang menduga bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak tidak didukung. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan kualitas audit memiliki pengaruh positif namun tidak yang signifikan. Transparansi dalam tata kelola perusahaan merupakan salah satu landasan manajemen yang baik. Transparansi ini dapat dicapai kapan saja dengan meminta auditor yang berkualitas tinggi, independen, dan berpengalaman menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan manajemen perusahaan dalam melakukan penghitungan pajaknya.

Karena beberapa faktor, termasuk fakta bahwa Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, khususnya untuk pajak penghasilan, kualitas audit tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga memiliki kepercayaan penuh dari wajib pajak. Ini akan menghasilkan moralitas pajak di masyarakat. Moralitas pajak, juga dikenal sebagai kesadaran secara sungguh-sungguh untuk membayar pajak, adalah salah satu komponen kesadaran negara.

Etika perpajakan, atau moralitas perpajakan, didasarkan pada gagasan bahwa Masyarakat mempunyai kewajiban moral untuk bertindak terhormat saat mengajukan pajak. Perspektif perilaku dan perspektif sikap merupakan dua sudut pandang dalam etika perpajakan. Menurut perspektif behavioral, etika perpajakan merujuk pada bagaimana wajib pajak menaati peraturan perpajakan, sedangkan perspektif sikap memandang etika perpajakan sebagai bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini mendukung anggapan bahwa moralitas dalam perpajakan mempengaruhi Keputusan wajib pajak untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Semakin kecil kemungkinan seorang wajib pajak melakukan upaya penghindaran pajak, maka semakin tinggi moral etika perpajakannya.

Karena penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran, maka auditor mungkin tidak menemukan apa pun, yang menjelaskan mengapa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, mereka lebih menekankan pada perpajakan dengan mencari celah hukum yang memungkinkan mereka terhindar dari pelanggaran hukum. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa bisnis memberikan keuntungan kepada KAP yang melakukan audit, sehingga mengurangi independensi KAP dalam meninjau laporan keuangan. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidaruk dan Fadilah (2020), yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahilia *et al*,(2022), yang menunjukkan hasil kualitas audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa sesuai dengan indikator yang ditetapkan IAPI, auditor dan manajemen bisnis menjadi lebih berhati-hati dalam memenuhi persyaratan kualitas audit. praktik penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin berkurang jika semakin tinggi nilai indikator kualitas auditnya. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan barang konsumsi dengan standar audit yang tinggi akan melakukan upaya untuk menahan diri dari penghindaran pajak agar bisnisnya dapat terus berjalan dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat.

4.4.3 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ketiga yang diduga bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan koneksi politik mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan. Pajak jauh lebih rendah jika perusahaan tersebut memiliki koneksi politik. Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah dikenakan resiko rendah dari wajib pajak. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Hal ini dilakukan pemerintah karena mereka mempercayai bahwa perusahaan tersebut tidak akan melakukan upaya penghindaran pajak. Tarif perusahaan dianggap relatif rendah apabila ditemukan terdapat koneksi politik, yang menyebabkan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh hubungan politik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prapita & Safrida (2019) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak di pengaruhi oleh koneksi politik.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asadanie dan Venusita (2020), yang menunjukkan hasil bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena ikatan politik yang dimiliki perusahaan dapat membantunya menerima perlakuan istimewa, yang membuatnya lebih mudah mendapatkan pinjaman dan mengurangi resiko pemeriksaan pajak. Selain itu, disalahgunakan dengan melakukan kecurangan untuk meminimalkan denda atau menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan apabila strategi penghindaran pajak yang digunakan diketahui karena adanya pelanggaran peraturan perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Guna mengetahui pengaruh ukuran atau skala perusahaan, kualitas audit, serta koneksi politik pada Tindakan penghindaran pajak adalah bagan dari tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mencakup semua perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI antara tahun 2018-2022. Sampel yang diperoleh sebanyak 31 perusahaan. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini :

1. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan < 0.05
2. Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas audit. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai signifikansi variabel kualitas audit > 0.05
3. Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh koneksi politik. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai signifikansi variabel koneksi politik > 0.05

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini masih terbatas pada sektor barang konsumsi yaitu sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik

dan keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga yang terdaftar di BEI, dan hanya 31 perusahaan dari seluruh Perusahaan yang terdaftar.

2. variabel independen yang diteliti masih terbatas pada ukuran perusahaan, kualitas audit,serta koneksi politik sedangkan faktor lain yang memiliki pengaruh pada penghindaran pajak masih banyak.

3. Untuk pengukuran variabel penghindaran pajak menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), yang dihitung melalui kas yang dibayarkan perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak.

5.3 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi oleh peneliti, untuk analisis selanjutnya. Berikut merupakan saran untuk akademisi :

1. Untuk pihak peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian selain perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI ini memungkinkan peneliti dapat menganalisis dan memberikan perbedaan terhadap variabel yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan berbagai jenis industri.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel independen yakni diatas 3 variabel sehingga informasi yang diberikan bisa lebih banyak.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan dalam mengukur penghindaran pajak agar dapat menggunakan pengukuran atau indikator yang berbeda selain CETR, misalnya menggunakan pengukuran *book tax gap* (BTG) atau *book tax different* (BTD), agar metode yang dilakukan lebih bervariasi.

4. 5.4 Implikasi

Berdasarkan penelitian diatas, implikasi dari penelitian ini yaitu

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman, gambaran, dan kontribusi yang berharga untuk mengoptimalkan pembayaran pajak.
2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, untuk mengawasi kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar guna memaksimalkan pendapatan negara. Untuk memaksimalkan pendapatan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka diharapkan pemerintah mampu meminimalisir celah hukum. Contohnya termasuk memperkuat peraturan yang ada saat ini dan mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan laporannya ketika mereka membayar pajak.
3. Bagi investor yang mempunyai kepentingan dengan suatu perusahaan, diharapkan untuk memberikan lebih banyak pemikiran dan perhatian pada elemen-elemen yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan dalam berinvestasi. Untuk mencapai keuntungan maksimal,

bisnis perlu melakukan investasi. Investor perlu mewaspadaai aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan agar dapat menilai kewajaran jumlah pajak yang diungkapkan pada laporan keuangan.

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman saat ini tentang penghindaran pajak dengan menjadi dasar penelitian masa depan mengenai topik ukuran perusahaan, kualitas audit, dan ikatan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmoula, L., Chouaibi, S., & Chouaibi, J. (2022). The effect of business ethics and governance score on tax avoidance: a European perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 576-597.
- Alfandia, N. S., & Putri, P. A. (2023). Audit committees, political connections, and audit quality on tax avoidance. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 211-216.
- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019, December). Do political connection, executive character, and audit quality affect the tax avoidance practice? Evidence in Indonesia. In *1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)* (pp. 332-338). Atlantis Press.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(2), 289-300.
- Ardillah, K., & Prasetyo, C. A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Comitee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 169-186.
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14-21.
- Aysha, N. S., & Sari, S. P. Executive Character Sustainability, Thin Capitalization, Political Connection, and Audit Quality on Tax Avoidance.
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 32(3), 326-349.
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. In *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II* (pp. 473-500). Routledge.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh karakteristik ceo, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169-184.
- Ernawati, S., Chandrarin, G., & Respati, H. (2019). Analysis of the effect of profitability, company size and leverage on tax avoidance (study on go public companies in indonesia). *International Journal Of Advances In Scientific Research And Engineering*, 5(10), 74-80.

- Fionasari, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28-40.
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2019. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 11(2).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Kusnadi, D. S. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 2(2), 257-263.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019, October). The effect of audit quality on tax avoidance. In *International Conference On Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019)* (pp. 72-76). Atlantis Press.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., & Li, Y. (2018). Do political connections weaken tax enforcement effectiveness?. *Contemporary Accounting Research*, 35(4), 1941-1972.
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The effects of financial distress, capital intensity, and audit quality on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282-287.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(1), 43-57.
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 1-16.
- Novriyanti, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 143-151.
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The influence of political connection on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82-90.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance (empirical study on mining companies listed in Indonesia stock exchange 2015-

- 2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247-258.
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board political connection and tax avoidance: Ownership structure as a moderating variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128-144.
- Sofie & Sembiring, F. R. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1011-1022.
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 226-234.
- Sidauruk, T. D., & Fadilah, S. N. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018. *Jurnal Liabilitas*, 5(2), 86-102.
- Suciana, M. F., & Setiawan, M. A. (2018). Pengaruh rotasi audit, spesialisasi industri kap, dan client importance terhadap kualitas audit (studi dengan pendekatan earning surprise benchmark). *Wahana Riset Akuntansi*, 6(1), 1159-1172.
- Sudibyoy, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78-85.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.
- Sulistyowati, N., & Prabowo, T. J. W. (2020). Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja lingkungan dan profitabilitas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3).
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
- Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektorlq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 2(2), 86-94.

- Tahilia, A. M. S., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(2), 49-62.
- Ulfa, R. (2021). Variabel penelitian dalam penelitian pendidikan. *Al-Fathonah*, 1(1), 342-351.
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 59-65.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., Amrie Firmansyah, S. E., & MM, M. A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Nama-nama Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	ASTRAAGRO LESTARI TBK.
2	ADES	AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
3	AMRT	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK.
4	BISI	BISI INTERNATIONAL TBK.
5	BUDI	BUDI STARCH & SWEETENER TBK
6	CAMP	CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK
7	CEKA	WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK.
8	CLEO	SARIGUNA PRIMATIRTA TBK
9	DLTA	DELTA DJAKARTA TBK.
10	EPMT	ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
11	GGRM	GUDANG GARAM TBK.
121	HMSP	H.M. SAMPOERNA TBK.
13	HOKI	BUYUNG POETRA SEMBADA TBK
14	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
15	INDF	NDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.
16	JPFA	APFA COMFEED INDONESIA TBK.
17	LSIP	PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
18	MLBI	MULTI BINTANG INDONESIA TBK.
19	MYOR	MAYORA INDAH TBK.
20	ROTI	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK.
21	SDPC	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK.
22	SKBM	EKAR BUMI TBK.
23	SKLT	SEKAR LAUT TBK.
24	SMAR	SMART TBK.
25	SSMS	SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

26	STTP	SIANTAR TOP TBK.
27	TBLA	UNAS BARU LAMPUNG TBK.
28	TGKA	TIGARAKSA SATRIA TBK
29	ULTJ	ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRAD
30	UNVR	UNILEVER INDONESIA TBK.
31	WIIM	WISMILAK INTI MAKMUR TBK.

Lampiran 2 : Tabulasi Data

Tahun	Kode	Y	X1	X2	X3
2018	AALI	0.31	30.92	1.00	1.00
2019	AALI	0	30.93	1.00	1.00
2020	AALI	0.39	30.96	1.00	1.00
2021	AALI	0.29	31.05	1.00	1.00
2022	AALI	0.26	31.01	1.00	1.00
2018	ADES	0.24	27.50	1.00	0.00
2019	ADES	0.24	27.44	1.00	0.00
2020	ADES	0.19	27.59	1.00	0.00
2021	ADES	0.21	27.90	0.00	0.00
2022	ADES	0.21	28.13	0.00	0.00
2018	AMRT	0.20	30.73	1.00	1.00
2019	AMRT	0.19	30.81	1.00	1.00
2020	AMRT	0.20	30.89	1.00	1.00
2021	AMRT	0.18	30.94	1.00	1.00
2022	AMRT	0.18	31.06	1.00	1.00
2018	BISI	0.20	28.65	1.00	0.00
2019	BISI	0.24	28.71	1.00	0.00
2020	BISI	0.24	28.70	1.00	0.00
2021	BISI	0.20	28.77	1.00	0.00
2022	BISI	0.19	28.86	1.00	0.00
2018	BUDI	0.30	28.85	1.00	0.00
2019	BUDI	0.14	28.73	1.00	0.00
2020	BUDI	0	28.72	1.00	0.00
2021	BUDI	0.20	28.73	0.00	0.00
2022	BUDI	0.20	28.79	1.00	0.00
2018	CAMP	0.26	27.64	1.00	0.00
2019	CAMP	0.23	27.69	1.00	0.00
2020	CAMP	0	27.71	1.00	0.00
2021	CAMP	0.21	27.77	1.00	0.00
2022	CAMP	0.21	27.70	1.00	0.00

2018	CEKA	0.25	27.79	1.00	1.00
2019	CEKA	0.24	27.96	1.00	1.00
2020	CEKA	0.22	28.08	1.00	1.00
2021	CEKA	0.21	28.16	1.00	1.00
2022	CEKA	0.22	28.17	1.00	1.00
2018	CLEO	0.22	27.45	1.00	0.00
2019	CLEO	0.24	27.85	1.00	0.00
2020	CLEO	0.21	27.90	1.00	0.00
2021	CLEO	0.21	27.93	1.00	0.00
2022	CLEO	0.21	28.16	1.00	0.00
2018	DLTA	0.23	28.05	1.00	1.00
2019	DLTA	0.23	27.99	0.00	1.00
2020	DLTA	0.25	27.83	1.00	1.00
2021	DLTA	0.22	27.90	1.00	1.00
2022	DLTA	0.22	27.90	0.00	1.00
2018	EPMT	0.25	29.75	1.00	0.00
2019	EPMT	0.28	29.79	1.00	0.00
2020	EPMT	0.22	29.85	1.00	0.00
2021	EPMT	0.22	29.91	1.00	0.00
2022	EPMT	0.23	29.97	1.00	0.00
2018	GGRM	0.26	31.87	1.00	0.00
2019	GGRM	0.25	32.00	1.00	0.00
2020	GGRM	0.21	31.99	1.00	0.00
2021	GGRM	0.23	32.13	1.00	0.00
2022	GGRM	0.24	32.11	0.00	0.00
2018	HMSP	0.25	31.47	0.00	0.00
2019	HMSP	0.25	31.56	0.00	0.00
2020	HMSP	0.23	31.54	0.00	0.00
2021	HMSP	0.22	31.60	1.00	0.00
2022	HMSP	0.24	31.63	1.00	0.00
2018	HOKI	0.25	27.36	1.00	0.00
2019	HOKI	0.27	27.47	1.00	0.00
2020	HOKI	0.25	27.53	1.00	0.00
2021	HOKI	0.31	27.62	0.00	0.00
2022	HOKI	0	27.42	0.00	0.00
2018	ICBP	0.28	31.17	1.00	0.00
2019	ICBP	0.28	31.29	1.00	0.00
2020	ICBP	0.26	32.27	1.00	0.00
2021	ICBP	0.20	32.40	1.00	0.00
2022	ICBP	0.24	32.38	1.00	0.00
2018	INDF	0.33	32.20	1.00	1.00
2019	INDF	0.33	32.20	1.00	1.00
2020	INDF	0.30	32.72	1.00	1.00
2021	INDF	0.22	32.82	1.00	1.00

2022	INDF	0.25	32.83	1.00	1.00
2018	JPFA	0.27	30.84	1.00	1.00
2019	JPFA	0.28	30.91	1.00	1.00
2020	JPFA	0.27	30.89	1.00	1.00
2021	JPFA	0.24	30.98	1.00	1.00
2022	JPFA	0.24	31.12	1.00	1.00
2018	LSIP	0.21	29.94	1.00	0.00
2019	LSIP	0.28	29.96	1.00	0.00
2020	LSIP	0.19	30.02	1.00	0.00
2021	LSIP	0.21	30.10	1.00	0.00
2022	LSIP	0.19	30.15	1.00	0.00
2018	MLBI	0.27	28.69	0.00	1.00
2019	MLBI	0.26	28.69	0.00	1.00
2020	MLBI	0.28	28.70	1.00	1.00
2021	MLBI	0.24	28.70	0.00	1.00
2022	MLBI	0.26	28.85	0.00	1.00
2018	MYOR	0.26	30.50	1.00	0.00
2019	MYOR	0.23	30.58	1.00	0.00
2020	MYOR	0.22	30.62	1.00	0.00
2021	MYOR	0.22	30.62	1.00	0.00
2022	MYOR	0.21	30.73	1.00	0.00
2018	ROTI	0.32	29.11	1.00	0.00
2019	ROTI	0.32	29.17	1.00	0.00
2020	ROTI	0.05	29.12	1.00	0.00
2021	ROTI	0.25	29.06	1.00	0.00
2022	ROTI	0.25	29.05	1.00	0.00
2018	SDPC	0.32	27.81	1.00	0.00
2019	SDPC	0	27.84	0.00	0.00
2020	SDPC	0	27.78	0.00	0.00
2021	SDPC	0	27.82	0.00	0.00
2022	SDPC	0.33	27.97	0.00	0.00
2018	SKBM	0.22	28.20	1.00	0.00
2019	SKBM	0.14	28.23	0.00	0.00
2020	SKBM	0.14	28.20	0.00	0.00
2021	SKBM	0.19	28.31	0.00	0.00
2022	SKBM	0	28.35	1.00	0.00
2018	SKLT	0	27.34	1.00	0.00
2019	SKLT	0.04	27.40	1.00	0.00
2020	SKLT	0	27.37	1.00	0.00
2021	SKLT	0	27.51	1.00	0.00
2022	SKLT	0	27.66	1.00	0.00
2018	SMAR	0.15	31.01	1.00	1.00
2019	SMAR	0.23	30.96	1.00	1.00
2020	SMAR	0.26	31.19	1.00	1.00

2021	SMAR	0.21	31.33	1.00	1.00
2022	SMAR	0.19	31.38	1.00	1.00
2018	SSMS	0	30.06	1.00	1.00
2019	SSMS	0	30.10	0.00	1.00
2020	SSMS	0	30.18	1.00	1.00
2021	SSMS	0.19	30.26	1.00	1.00
2022	SSMS	0.19	30.27	1.00	1.00
2018	STTP	0.21	28.60	1.00	0.00
2019	STTP	0.20	28.69	1.00	0.00
2020	STTP	0.19	28.87	0.00	0.00
2021	STTP	0.19	29.00	1.00	0.00
2022	STTP	0.17	29.16	1.00	0.00
2018	TBLA	0.27	30.42	1.00	0.00
2019	TBLA	0.27	30.49	1.00	0.00
2020	TBLA	0.24	30.60	1.00	0.00
2021	TBLA	0.23	30.68	0.00	0.00
2022	TBLA	0.21	30.80	0.00	0.00
2018	TGKA	0.25	28.88	1.00	0.00
2019	TGKA	0.23	28.73	1.00	0.00
2020	TGKA	0.23	28.84	1.00	0.00
2021	TGKA	0.21	28.86	1.00	0.00
2022	TGKA	0.21	29.06	1.00	0.00
2018	ULTJ	0.26	29.35	1.00	0.00
2019	ULTJ	0.25	29.52	1.00	0.00
2020	ULTJ	0.23	29.80	1.00	0.00
2021	ULTJ	0.17	29.63	0.00	0.00
2022	ULTJ	0.25	29.63	1.00	0.00
2018	UNVR	0.25	30.64	0.00	1.00
2019	UNVR	0.25	30.66	1.00	1.00
2020	UNVR	0.22	30.65	0.00	1.00
2021	UNVR	0.23	30.58	0.00	1.00
2022	UNVR	0.23	30.54	0.00	1.00
2018	WIIM	0.28	27.86	1.00	0.00
2019	WIIM	0	27.89	1.00	0.00
2020	WIIM	0.20	28.11	1.00	0.00
2021	WIIM	0.18	28.27	1.00	0.00
2022	WIIM	0.22	28.41	1.00	0.00

LAMPIRAN 3 : Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04066160
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.058
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

LAMPIRAN 4 : Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Perusahaan	.930	1.075
	Kualitas Audit	.989	1.011
	Koneksi Politik	.931	1.074

LAMPIRAN 5 : Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.108
Ukuran	.297
Perusahaan	
Kualitas Audit	.588
Koneksi Politik	.594

LAMPIRAN 6 : Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.398 ^a	.158	.151	.03340	1.916

LAMPIRAN 7 : Hasil Statistik Deskriptif Berskala Rasio

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran	155	27.34	32.83	29.5140	1.51750
Perusahaan					
Tax	155	.04	.33	.2318	.04589
Avoidance					
Valid N (listwise)	155				

LAMPIRAN 8 : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Dummy

Variabel	Kriteria	Kode	Jumlah	Sampel
Koneksi Politik	Perusahaan yang melakukan koneksi politik	1	50	32%
	Perusahaan yang tidak melakukan koneksi politik	0	105	68%
	Total		155	

Kualitas Audit	Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik	1	124	80%
	Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang buruk	0	31	20%
	Total			

LAMPIRAN 9 : Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	.2.288	.024 ^b
	Residual		
	Total		

LAMPIRAN 10 : Hasil Uji T

Model		Unstandardi zed Coefficients B	T	Sig.
1	(Constant)	.110	2.151	.033
	Ukuran Perusahaan	.004	2.225	.028
	Kualitas Audit	.006	.865	.389
	Koneksi Politik	.008	1.348	.180
